

**KEPENTINGAN SELANDIA BARU MELAKUKAN KERJASAMA
PERDAGANGAN BEBAS DENGAN INDONESIA DALAM
KERANGKA AANZFTA TAHUN 2012-2015**

**Oleh :
Desti Anandya Fajri
Pembimbing : Faisyal Rani, S.I.P, M.A**

Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya km 12,5 Simpang Baru – Pekanbaru 28293
TELP. (0761) 63277 / 23430

Abstract

New Zealand is a small country, the same size with the Britania Raya or Japan, with a population of only four million people, this country including desolation. New Zealand diplomatic relations - Indonesia has been established since 1958. As the two democratic countries, Indonesia and New Zealand have the basis of the relationship established. This research aims to explain the ASEAN - Australia - New Zealand Free Trade Area (AANZFTA), explains the existence of economic and political interests of New Zealand against Indonesia and explained the New Zealand free trade cooperation with Indonesia in the framework of the AANZFTA Year 2012-2015.

This research uses qualitative research methodology that is eksplanatif i.e. a research that tries to explain from some formulation of problems that the writer take. This research limits on : 1) the interests of the New Zealand free trade cooperation with Indonesia in the framework of the AANZFTA, 2) This Research focused on the year 2012-2015, where actually in that year Indonesia and New Zealand in the period of the implementation of the cooperation agreement AANZFTA.

Based on the results of the research that has been carried out against this research, so it can be taken some conclusions, namely International Trade tax revenue from 2012-2014 export tax declined significantly, New Zealand is the main producer of products made from milk (dairy products) and flesh, timber and wood products, fish and other cereal products, machinery and agricultural products such as fruit and grain. New Zealand political influence for Indonesia because hdiplomatic ubungan Indonesia - New Zealand has been established since 1958.

Keyword : Interests, New Zealand, Indonesia, Free Trade, AANZFTA, Years 2012-2015

PENDAHULUAN

Selandia Baru adalah negara kecil, yang berukuran sama dengan

Britania Raya atau Jepang, dengan populasi hanya empat juta orang, negara ini termasuk sepi. Selandia

Baru termasuk dalam negara maju dengan tingkat pertumbuhan ekonomi menyaingi Eropa Selatan dalam beberapa hal. Selandia Baru termasuk dalam salah satu negara terbaik misalnya pada Indeks Pembangunan Manusia yang menempatkan Selandia Baru pada urutan ketiga. Ekspor merupakan andalan utama perekonomian negara ini sehingga dampak perekonomian dunia akan berpengaruh langsung pada kondisi ekonomi negara ini.

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) yang pada awal pembentukannya pada tahun 1967, lebih ditujukan pada kerjasama yang berorientasi politik untuk mencapai perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Tenggara, dalam perjalanannya berubah menjadi kerjasama regional dengan memperkuat semangat stabilitas ekonomi dan sosial di kawasan Asia Tenggara, antara lain melalui percepatan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan budaya dengan tetap memperhatikan kesetaraan dan kemitraan, sehingga menjadi landasan untuk terciptanya masyarakat yang sejahtera dan damai.

Dalam konteks ini, perlu dicatat bahwa terlepas dari prinsip bilateralis yang mulai diterapkan oleh Australia untuk melakukan diplomasi perdagangan dalam satu dekade terakhir, wacana inisiatif FTA antara Australia dengan Selandia Baru dan ASEAN (*AFTACER, ASEAN Free Trade Area-Closer Economic Relationship*) yang pada akhirnya diberi nama *AANZFTA (ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area)* telah digagas sejak akhir tahun 1999.

Berbagai studi yang mendalami prospek keuntungan ekonomi Australia maupun ASEAN dalam *AFTA-CER* menunjukkan bahwa keuntungan ekonomi maksimal tetap dapat diraih melalui perjanjian perdagangan bilateral. Salah satu studi tersebut dikeluarkan oleh *National Interest Analysis* (NIA), yang menegaskan bahwa pada sebagian sektor industri, tarif bea masuk yang diatur dalam *AANZFTA* masih lebih tinggi dibandingkan dengan tarif yang diterapkan dalam perjanjian perdagangan bilateral Australia dengan beberapa negara di Asia Tenggara.

Hubungan diplomatik Selandia Baru - Indonesia telah terjalin sejak 1958. Selaku dua negara demokrasi, Indonesia dan Selandia Baru memiliki dasar hubungan yang kokoh. Hubungan bilateral kedua negara diawali dengan kerjasama di bidang pendidikan pada akhir tahun 1950-an, yaitu dengan dilaksanakannya pendidikan bahasa Inggris bagi guru-guru bahasa Inggris di bawah kerangka *Colombo Plan*. Selandia Baru turut mengirimkan bantuan dana, barang dan personil militer untuk penanganan bencana tsunami di Aceh dan Sumatera Utara, serta turut berpartisipasi pula dalam *KTT Penanggulangan Tsunami* bulan Januari 2005 di Jakarta. Tahun 2008 Indonesia – Selandia Baru memasuki 50 tahun hubungan diplomatik. Dalam rangka memperingati 50 tahun hubungan diplomatik tersebut, kedua negara telah menyelenggarakan sejumlah kegiatan baik di Selandia Baru maupun di Indonesia, seperti

misalnya workshops, forum bisnis, commemorative seminar dan kegiatan lainnya.

Diantara beberapa perjanjian perdagangan regional yang telah diimplementasikan oleh Indonesia yang paling baru adalah perjanjian perdagangan barang dalam rangka ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA). Pengesahan AANZFTA sendiri oleh Pemerintah Indonesia diratifikasi dalam Peraturan Presiden No.26 Tahun 2011 sedangkan penetapan tarif bea masuk atas barang impor dalam rangka AANZFTA diatur dalam PMK No.166 Tahun 2011.

Pada tanggal 25 Februari 2009 yang lalu Departemen Perdagangan menyelenggarakan acara Sosialisasi KTT ASEAN ke-14 dan hasil-hasil Perundingan. Dalam kesempatan tersebut diinformasikan hal yang berkaitan dengan AANZFTA antara lain kronologi realisasi yang merupakan perjalanan panjang yang dimulai dengan *Economic Benefits Study* yang dilaksanakan pada tahun 1997, disusul dengan Joint Declaration of Leaders of ASEAN-Australia and New Zealand Commemorative Summit pada November 2004.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menjelaskan ASEAN – Australia – New Zealand Free Trade Area (AANZFTA). 2) Menjelaskan adanya kepentingan ekonomi dan politik Selandia Baru terhadap Indonesia. 3) Menjelaskan kerjasama perdagangan bebas Selandia Baru dengan Indonesia dalam kerangka AANZFTA Tahun 2012-2015.

Kerangka Dasar Teori

Kerjasama Internasional

Kerjasama ekonomi internasional adalah suatu kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh negara dengan negara lain. Kerjasama tersebut dapat terjadi hanya melibatkan dua negara saja maupun lebih. Karena adanya keterkaitan, interaksi, dan pengaruh antara faktor-faktor ekonomi dan politik dalam ruang lingkup hubungan internasional maka terdapat dua variabel pokok dalam fenomena ekonomi politik internasional, yaitu bahwa hakekat aktifitas ekonomi adalah pasar dan hakekat aktifitas politik adalah negara.

Menurut K.J Holsti, kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
- b. Pandangan atau harapan dari suatu dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh Negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
- c. Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.

- d. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
- e. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan negara.

Teori keunggulan komparatif (Comparative Advantage = David Ricardo)

Teori keunggulan komparatif merupakan indikator yang paling banyak digunakan dalam mengukur kinerja perdagangan internasional suatu negara. Suatu negara dianggap memiliki keunggulan komparatif apabila memiliki biaya relatif rendah dalam produksi bila dibandingkan dengan negara lain.

Teori keunggulan komparatif dicetuskan pertama kali oleh David Ricardo. Menurut David Ricardo, setiap negara atau bangsa seperti halnya orang, akan memperoleh hasil dari perdagangannya dengan mengekspor barang atau jasa yang merupakan keunggulan komparatif terbesarnya dan mengimpor barang atau jasa yang bukan keunggulan komparatifnya. David Ricardo mengemukakan, terjadinya keunggulan komparatif timbul dari adanya perbedaan teknologi yang membawa pada perbedaan produktivitas antar negara..

Teori *absolute advantage* ini lebih mendasarkan pada besaran (variabel) riil bukan moneter, sehingga sering dikenal dengan nama teori murni (*pure theory*) perdagangan internasional. Murni, dalam arti bahwa teori ini memusatkan perhatian pada variabel

riil seperti misalnya, nilai sesuatu barang diukur dengan banyaknya tenaga kerja yang dipergunakan untuk menghasilkan barang. Makin banyak tenaga kerja yang digunakan akan makin tinggi nilai barang tersebut.¹

Sedangkan, keunggulan yang biasanya dimiliki oleh suatu negara berbeda berdasarkan karakteristik wilayah/geografis dan masyarakatnya. Oleh sebab itu, ada beberapa keunggulan mutlak, yaitu:

1. *Natural Advantage* (keunggulan faktor alami) Keunggulan yang tersedia di alam atau efisiensi produksi berdasarkan kondisi alam (geografis, iklim dsb) yang lazim disebut sumber daya alam. Seperti, Indonesia memiliki keunggulan mutlak pada minyak bumi, rotan dan sebagainya. Eropa unggul pada produksi anggur, gandum.
2. *Acquired Advantage* (keunggulan yang diperoleh karena usaha) Keunggulan dalam memproduksi barang tertentu dengan memaksimalkan sumber daya atau keunggulan-keunggulan yang dimiliki. Sehingga produk yang dihasilkan lebih unggul (*high quality*). Seperti, Swiss unggul dalam memproduksi jam. Denmark menspesialisasi biskuit. Perancis memiliki *Acquired Advantage* pada

¹ Op. Cit Nopirin. 2012. Hal 8

- minyak wangi.
3. *Resource Efficiency* (efisiensi sumber daya)
Suatu negara yang mampu menggunakan sumber dayanya dengan sangat efisien, sehingga perbandingan harganya sangat jauh dengan negara lain.
 4. Besar Kecilnya Negara
Mempertimbangkan besar kecilnya suatu negara serta skala perekonomiannya.²

Perdagangan Internasional

Teori perdagangan internasional membantu menjelaskan arah serta komposisi perdagangan antara beberapa negara serta bagaimana efeknya terhadap struktur perekonomian suatu negara. Perdagangan internasional mampu memberikan adanya keuntungan (*gains from trade*). Melalui perdagangan internasional dapat diperoleh keuntungan, diantaranya:

- a. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri,
- b. Adanya keuntungan dari spesialisasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan faktor produksi,
- c. Memperluas pasar industri-industri dalam negeri,
- d. Menggunakan teknologi modern dan meningkatkan produktivitas.

Perdagangan Bebas

Perdagangan bebas adalah suatu sistem di mana barang, arus modal, dan tenaga kerja secara bebas antara negara-negara, tanpa

hambatan yang bisa menghambat proses perdagangan. Banyak negara memiliki perjanjian perdagangan bebas, dan beberapa organisasi internasional mendorong perdagangan bebas antara anggota mereka. sejumlah argumen baik mendukung dan melawan praktek ini, dari berbagai ekonom, politisi, industri, dan ilmuwan sosial.

Perdagangan

Hipotesa

Jawaban sementara (hipotesa) yang dirumuskan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah “Kepentingan Selandia Baru melakukan kerjasama perdagangan bebas dengan Indonesia dalam kerangka AANZFTA Tahun 2012-2015 karena adanya kepentingan ekonomi dan politik Selandia Baru terhadap Indonesia”.

Variabel independen : adanya kepentingan ekonomi dan politik Selandia Baru terhadap Indonesia dengan indikatornya yaitu :

1. Penerapan pajak.
2. Indonesia memiliki sumber daya alam.
3. Penetapan bea cukai oleh Pemerintah Indonesia.
4. Peluang pasar bisnis bagi Selandia Baru.
5. Politik Selandia Baru dalam AANZFTA
6. Pengaruh Politik Selandia Baru bagi Indonesia.

variabel dependen :

kerjasama perdagangan bebas Selandia Baru dengan Indonesia dalam kerangka AANZFTA Tahun 2012-2015 dengan indikator sebagai berikut :

1. Tahap perjanjian perdagangan bebas Selandia Baru dengan Indonesia tahun

² Op. Cit. Rudy T. May. 2002. Hal 9-11.

- 2008-2011.
2. Tahap perjanjian perdagangan bebas Selandia Baru dengan Indonesia tahun 2012-2015.
 3. Penawaran proposal kerja sama perdagangan bebas oleh Selandia kepada Indonesia.

Metodologi Penelitian

Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang *bersifat eksplanatif yakni suatu penelitian yang berusaha untuk menjelaskan* dari beberapa rumusan masalah yang penulis ambil, maka penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini hanya berupa pencarian fakta-fakta mengenai peristiwa yang dijadikan obyek dalam penelitian ini adalah proses kepentingan Selandia Baru melakukan kerjasama perdagangan bebas dengan Indonesia dalam kerangka AANZFTA Tahun 2012-2015.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah menghubungkan teori dengan data-data yang didapatkan melalui riset perpustakaan (*library research*). Data-data tersebut didapatkan dari buku-buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan sumber lainnya (*document analysis*). Selain itu, penulis juga menggunakan saran internet dalam proses pengumpulan data yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Ruang Lingkup Penelitian

Pada penelitian ini, penulis memberikan batasan-batasan agar fokus dalam melakukan penelitian terhadap fenomena yang dijadikan sebagai objek penelitian. Untuk membatasi masalah yang akan dijelaskan. Penelitian ini membatasi pada :

1. Kepentingan Selandia Baru melakukan kerjasama perdagangan bebas dengan Indonesia dalam kerangka AANZFTA.
2. Penelitian ini difokuskan pada tahun 2012-2015, dimana sebenarnya pada tahun tersebut Indonesia dan Selandia Baru dalam masa-masa pelaksanaan perjanjian kerjasama AANZFTA.

KEPENTINGAN EKONOMI DAN POLITIK SELANDIA BARU TERHADAP INDONESIA

Penerapan Pajak Bagi Kedua Negara

Pajak adalah iuran kepada Negara yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Penerimaan pajak, yang meliputi pemasukan pajak serta bea dan cukai, juga termasuk tulang punggung anggaran negara.

Tabel 3.1 Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional 2012-2014

No	Sumber Penerimaan	Tahun		
		2012	2013	2014
1	Bea Masuk	28	30	33
		418	812	937
2	Pajak Ekspor	21	17	19
		238	609	978

Sumber: Nota Keuangan 2013

Berdasarkan pada Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional 2012-2014 pada tabel 3.1, baik Bea masuk dan pajak ekspor mengalami penurunan yang signifikan. Fungsi pajak dalam perdagangan internasional tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan (*fungsi budgetair*) saja, namun pajak lebih berperan sebagai alat pengatur (*regulerend*).

Indonesia Memiliki Sumber Daya Alam

Fakta fisik bahwa dua per tiga wilayah Indonesia berupa laut, maka sumber daya alam di laut memiliki potensi yang sangat besar. Selain mengandung minyak, gas, mineral dan energi laut non-konvensional, serta harta karun yang sudah mulai digali meskipun masih terbatas, laut juga menghasilkan ikan yang potensi lestarnya diperkirakan sebesar 6, 4 juta ton per tahun. Saat ini yang baru dimanfaatkan sekitar 70 %. Pengembangan

Indonesia adalah negara yang kaya raya. Potensi kekayaan alamnya sangat luar biasa, baik sumber daya alam hayati maupun non hayati. Bisa dibayangkan, kekayaan alamnya mulai dari kekayaan laut, darat, bumi dan kekayaan lainnya yang terkandung di dalam bumi Indonesia

tercinta ini mungkin tidak bisa dihitung. Apabila dilihat secara geografis, dari sabang sampai merauke, terbentang tidak sedikit pulau yang ada di Indonesia. Dengan pulau besar, mulai pulau Jawa, sumatra, kalimantan, sulawesi serta Irian Jaya. Namun disamping itu, terdapat pula ribuan pulau yang mengelilingi alam Indonesia.

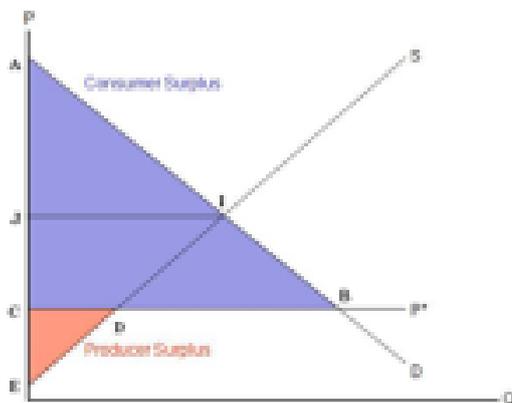
Penetapan Bea Cukai Oleh Pemerintah Indonesia

Bea masuk adalah pungutan negara atas barang impor yang tujuan utamanya adalah untuk membatasi masuknya barang impor dalam rangka perlindungan produk dalam negeri. Bea masuk dikenakan bilamana suatu negara memiliki produk sejenis yang dibuat di dalam negeri dimana produk tersebut perlu perlindungan dalam waktu tertentu hingga dapat bersaing secara bebas dengan produk yang berasal dari luar negeri. Meskipun saat ini kecenderungan tarif bea masuk semakin menurun seiring dengan berlakunya *Free Trade Agreement* (FTA), namun untuk barang-barang tertentu khususnya produk pertanian, World Trade Organization (WTO) masih memberikan ruang untuk proteksi oleh negara-negara yang menghasilkan produk tersebut.

Besaran tarif yang ditetapkan Menteri Keuangan ini tentunya akan mempengaruhi volume atau nilai pergerakan arus barang ekspor/impor. Dengan tarif tinggi maka akan menghambat barang ekspor/impor dan sebaliknya tarif rendah maka akan meningkatkan ekspor/ekspor. Dalam teori ekonomi, dengan adanya pajak perdagangan internasional, sesungguhnya

mengurangi keuntungan yang akan didapat oleh konsumen atau *consumer surplus* dan memberi tambahan keuntungan bagi produsen atau *producer surplus* serta menambah penerimaan perpajakan. Ilustrasi kondisi ini diperlihatkan dalam Gambar berikut :

Gambar 3.1 Dampak Pemberlakuan Tarif Bea Masuk Terhadap Suatu Perekonomian



a) Tanpa tarif
b) Dengan tarif

Sumber : Krugman (2005)³

Pada keseimbangan autarky (Gambar a), perekonomian berada di titik I, dimana keuntungan konsumen adalah seluas areal AIJ, sementara produsen akan mendapatkan keuntungan seluas areal CIJ. Dengan adanya liberalisasi perdagangan internasional, titik keseimbangan bergeser ke titik B pada level harga sebesar P*, dengan keuntungan konsumen sebesar ABC

dan keuntungan produsen sebesar CDE. Dalam kondisi demikian, liberalisasi perdagangan internasional memberikan tambahan keuntungan bagi konsumen dan mengurangi keuntungan produsen.

Bahwa dalam rangka meningkatkan kerjasama ekonomi antara negara anggota ASEAN, Australia, dan Selandia Baru, Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru (*Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area*) dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* (persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru).

Peluang Pasar Bisnis Bagi Selandia Baru⁴

Selandia Baru merupakan produsen utama produk-produk yang terbuat dari susu (*dairy products*) dan daging, kayu dan produk kayu, ikan dan olahannya, mesin-mesin, serta produk pertanian seperti buah-buahan dan gandum. GDP Selandia Baru sebesar US\$ 94,6 miliar dan GDP per kapitanya sebesar US\$ 25.239 dengan tingkat pertumbuhan mencapai 2,2%. Sektor-sektor yang memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian Selandia Baru adalah sektor jasa (68,4%), industri (27,3%) dan sektor pertanian (4,3%).

³<https://nasruddindjoko.wordpress.com/2014/08/20/kebijakan-fiskal-dalam-perdagangan-internasional-antisipasi-defisit-neraca-perdagangan-barang/>

⁴<http://beritasore.com/2010/08/12/indonesia-selandia-baru-pererat-hubungan-bisnis/>

Bersama-sama dengan Australia, Selandia Baru menjalankan kebijakan liberalisasi perdagangan, meningkatkan akses pasar serta membuka impor dengan persyaratan standard yang sangat tinggi. Komoditi impor Selandia Baru terdiri dari mesin dan peralatan mesin, kendaraan dan pesawat udara, minyak bumi, elektronik, tekstil dan plastik. Sedangkan komoditi ekspor Selandia Baru terdiri dari *Crude Petroluem Oils*, batu bara, briket, *ovoids and similar solid fuels manufactured from coal, oil-cake nes, auxiliary plant for boiler*, dan *television receiver*.

Politik Selandia Baru dalam AANZFTA

Secara umum kebijakan luar negeri Selandia Baru didasarkan pada upaya mempengaruhi pandangan internasional agar mendukung nilai dan kepentingannya, yaitu berkontribusi dalam pemeliharaan lingkungan dunia yang stabil, damai dan makmur. Sebagai perpanjangan tangan dari politik dalam negeri, maka kebijakan luar negeri dirancang dengan tujuan untuk mempertahankan dan memajukan keamanan nasional, ekonomi dan sektor-sektor penting lainnya.

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Selandia Baru tergolong hubungan yang cukup unik, di satu sisi menjanjikan berbagai peluang kerjasama namun di sisi lain juga memiliki berbagai tantangan. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai perbedaan mencolok diantara kedua negara dan bangsa bertetangga, yang terkait dengan kebudayaan, tingkat kemajuan

pembangunan, orientasi politik yang mengakibatkan pula perbedaan prioritas kepentingan.

Tidak dipungkiri, perbedaan-perbedaan tersebut akan menciptakan berbagai masalah yang akan selalu mewarnai hubungan kedua negara di masa-masa mendatang. Oleh karena itu para pemimpin dan masyarakat kedua negara dituntut untuk selalu siap dengan berbagai solusi untuk menghadapi setiap masalah yang muncul.

Pengaruh Politik Selandia Baru Bagi Indonesia

Hubungan diplomatik Indonesia – Selandia Baru telah terjalin sejak 1958. Selaku dua negara demokrasi, Indonesia dan Selandia Baru memiliki dasar hubungan yang kokoh. Hubungan bilateral kedua Negara diawali dengan kerjasama di bidang pendidikan pada akhir tahun 1950-an, yaitu dengan dilaksanakannya pendidikan bahasa Inggris bagi guru-guru bahasa Inggris di bawah kerangka Colombo Plan.

Sejatinya AANZ-FTA tidak banyak manfaatnya bagi Indonesia. Dalam AANZFTA, Indonesia berada pada posisi pinggir, yang artinya Indonesia tidak diuntungkan karena hanya jadi pemasok bahan mentah. Ekspor Indonesia ke Australia dan Selandia Baru amat kecil hanya 3 persen dari total ekspor. Australia dan Selandia Baru bukan tujuan utama produk ekspor Indonesia. Impor Indonesia dari Australia dan Selandia Baru tidak terlalu besar. Namun Indonesia kian bergantung pada impor produk pertanian dari Australia, terutama terigu, kapas, susu, dan ternak hidup, terutama sapi.

Dapat disimpulkan bahwa AANZFTA berdampak buruk bagi perekonomian petani pangan dan peternakan domestik.

KERJASAMA PERDAGANGAN BEBAS SELANDIA BARU DENGAN INDONESIA DALAM KERANGKA AANZFTA TAHUN 2012-2015

Tahap Perjanjian Perdagangan Bebas Selandia Baru Dengan Indonesia Tahun 2008-2011

Menyimpulkan Hasil Negosiasi AANZFTA dan Verifikasi Legal

Verifikasi naskah AANZFTA telah diselesaikan pada September 2008 dan Verifikasi tarif, perdagangan jasa, dan perpindahan penduduk diselesaikan pada bulan Februari 2009.

Penandatanganan Naskah AANZFTA oleh Menteri dan Persetujuan Parlemen

Penandatanganan harus disetujui oleh Presiden atau kepala pemerintahan yang lainnya. Di Australia dan Selandia Baru, perjanjian juga harus disetujui oleh Gubernur Jenderal. AANZFTA akhirnya ditandatangani pada 27 Februari 2009 di Thailand oleh keduabelas negara. Selanjutnya perjanjian akan melalui proses persetujuan di Parlemen, namun beberapa negara persetujuan parlemen tidak dibutuhkan, tergantung pada regulasi negara tersebut. Setelah perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak, naskah akan dikirimkan ke WTO.

Perjanjian AANZFTA terdiri dari 18 Bab, 212 Pasal dan 4 lampiran, yang mencakup: Perdagangan Barang, Perdagangan Jasa, Investasi, ROO (Ketentuan Asal), *Customs*, SPS (*Sanitary and Phytosanitary*), TBT, *Safeguard*, Hak Kekayaan Intelektual, Kebijakan Persaingan, MNP, Kerja Sama Ekonomi, DSM, *E-commerce* yang kurang lebih mencapai 5000 halaman.

Pertemuan Ketiga

Pertemuan ke-3 *AANZ FTA Joint Committee* (FJC) dilaksanakan di Wellington, New Zealand pada tanggal 30 Mei – 2 Juni 2011. Pertemuan dihadiri oleh wakil seluruh negara anggota ASEAN, Australia, New Zealand, dan Sekretariat ASEAN. Pembahasan di tingkat *FTA Joint Committee* mencakup hal-hal yang bersifat umum (*recent economic and economic policy development*), selain membahas laporan badan-badan bawahannya dan mengambil keputusan atas hal-hal yang tidak dapat diputuskan di tingkat *committee* atau karena sifatnya harus diputuskan pada tingkat *FTA Joint Committee*.

Pertemuan ke-4 ASEAN Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) Joint Committee

Pertemuan sepakat untuk memutakhirkan *focal and customs contact point* ASEAN-Australia New Zealand (AANZ) serta *Specimen Signatures* dan *Official Seals* ke dalam *website* AANZFTA. Sebagai tindak lanjut mandat keputusan ASEAN Economic Ministers (AEM), pertemuan sepakat menghapus nilai FOB dalam SKA dan diperlukan protokol amandemen AANZFTA. Untuk memfasilitasi perubahan-perubahan AANZFTA di masa mendatang, ASEAN mengusulkan dibuat ketentuanketentuan yang memungkinkan FTA-JC dapat mengadopsi perubahan-perubahan yang terjadi pada AANZFTA tanpa melalui protokol.

Pertemuan tidak mencapai konsensus untuk mengadopsi *full cummulation*, namun ASEAN sepakat akan menggali kemungkinan penerapan *full cummulation pilot project* berdasarkan *voluntrary basis* untuk produk-produk tertentu atau sektor-sektor yang akan diidentifikasi kemudian. Beberapa negara ASEAN tetap akan melakukan konsultasi domestik terkait dengan pelaksanaan *pilot project*.

Protokol yang akan mengubah Persetujuan Pembentukan ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA)

AANZFTA ditandatangani pada tahun 2009 dan mulai berlaku untuk Selandia Baru pada tahun 2010. Pada awal pelaksanaan AANZFTA, sejumlah inefisiensi diidentifikasi oleh Pihak AANZFTA,

termasuk para pedagang. Protokol ini membahas isu-isu ini, yang meliputi:

1. Pengungkapan yang tidak perlu dari informasi komersial yang berpotensi sensitif pada Sertifikat Asal mana informasi yang tidak ada relevansinya dengan klaim untuk preferensi;
2. Kesulitan menemukan aturan yang sesuai asal untuk menentukan apakah baik yang memenuhi syarat untuk tarif pajak preferensial;
3. Ketidakmampuan untuk memodifikasi persyaratan untuk informasi tentang Surat Keterangan Asal yang diperlukan, tanpa melalui proses perubahan perjanjian penuh; dan
4. Tantangan yang dihadapi oleh beberapa pihak untuk menyelesaikan tarif dan Produk Aturan Spesifik Asal (PSR) transposisi.

Protokol membuat empat perubahan inti :

1. Penghapusan persyaratan bagi eksportir untuk memasukkan on Board (FOB) nilai Gratis barang pada Sertifikat Asal bila tidak menggunakan aturan berdasarkan nilai untuk mengklaim preferensi;
2. Penghapusan 'aturan umum' untuk aturan asal dalam mendukung konsolidasi PSRs untuk semua produk dalam Lampiran komprehensif;
3. Penghapusan Daftar Persyaratan Data (Certificate of Origin konten) dari teks perjanjian, sehingga daftar adalah lebih mudah untuk

- mengubah; dan
4. Pembentukan prosedur yang harus diikuti untuk mempercepat transposisi masa depan tarif dan Produk Tertentu Peraturan (PSRs) jadwal berikut perubahan Dunia Customs Organization Harmonised System (HS) klasifikasi tarif.

**Menyepakati Perjanjian
mendirikan ASEAN-Australia-
New Zealand Free Trade Area
(AANZFTA)⁵**

Secara khusus, sertifikat tidak akan lagi memerlukan free on board (FOB) nilai konsinyasi untuk muncul kecuali asal kualifikasi didasarkan pada kandungan nilai regional baik. Informasi lebih lanjut tentang perubahan Protocol adalah dalam Panduan untuk bisnis: menggunakan Protokol Pertama yang meliputi 'pedoman Transisi untuk menyelesaikan informasi tentang asal-usul pemberian kriteria pada sertifikat asal (CoO) bentuk AANZFTA'. Protokol Pertama akan berlaku untuk Selandia Baru dan sembilan dari 12 AANZFTA Pihak pada 1 Oktober 2015; dan dua Pihak yang tersisa (Kamboja dan Indonesia) menargetkan pelaksanaan pada 1 Januari 2016.

Sepuluh Pihak yang melaksanakan Protokol Pertama pada 1 Oktober 2015 telah menyarankan mereka akan menerima baik sertifikat asli asal atau versi diubah oleh Protokol hingga 31 Maret 2016. Dari 1 April 2016, ini 10 Partai akan

menerima hanya direvisi sertifikat. Kamboja dan Indonesia menyarankan mereka tidak dapat menerima sertifikat revisi menjelang pelaksanaan diharapkan mereka Protokol Pertama.

Sampai semua 12 AANZFTA Pihak melaksanakan Protokol Pertama, Selandia Baru sertifikasi akan terus mengeluarkan sertifikat dalam format asli dan di bawah pengaturan asli (termasuk nilai FOB). Ini akan meminimalkan biaya untuk pedagang dalam mengembangkan jangka pendek, menduplikasi sertifikat sistem penerbitan asal dan mengurangi prospek gangguan perdagangan karena format yang salah yang dikeluarkan.

Dengan 1 April 2016, semua ekspor asal-bersertifikat dari Selandia Baru ke AANZFTA Pihak perlu disertifikasi dengan pendekatan direvisi. Hal ini akan membutuhkan Selandia Baru Menerbitkan Badan untuk membuat perubahan pada aplikasi elektronik, pertimbangan dan sertifikat penerbitan sistem mereka untuk memperhitungkan perubahan kecil dalam data sertifikat dan persyaratan format. Eksportir Selandia Baru di bawah AANZFTA harus mendekati mereka dipilih tersebut Menerbitkan tubuh untuk informasi lebih lanjut tentang perubahan dan pengaturan menjelang implementasi penuh oleh 1 April 2016.

⁵ <http://www.asean.fta.govt.nz/aanzfta-first-protocol-implemented/>

Penawaran Proposal Kerja Sama Perdagangan Bebas Oleh Selandia Kepada Indonesia

Berdasarkan siaran pers depdag yang dilansir dari data Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional (KPI) Depdag, dalam AANZFTA ini, Indonesia memberikan komitmen eliminasi untuk 10.397 pos tarif. Sedangkan 645 pos tarif lainnya diamankan dengan komitmen penurunan atau pemotongan tingkat tarif dan 117 sisanya dikelompokkan ke dalam Exclusion List.

Kedua delegasi diskusi pembahasan meningkatkan kerjasama perdagangan investasi sektor pariwisata, transportasi udara, pendidikan, geothermal dan konstruksi. Beberapa isu yang dibahas adalah kinerja perdagangan dan investasi bilateral, perkembangan isu multilateral terkait *Doha Round (WTO)* dan G-20, perkembangan kerjasama ASEAN, isu sertifikasi halal Selandia Baru, serta *draft* kerjasama pertanian, tenaga kerja dan lingkungan hidup dalam kerangka bilateral *economic cooperation packages* yang terkait dengan AANZFTA. Beberapa kesepakatan yang dihasilkan dalam SOM TIF ke-2 Indonesia-Selandia Baru ini adalah :

1. Kerjasama di bidang lingkungan hidup
2. Kerjasama di bidang pertanian
3. Kerjasama di bidang tenaga kerja
4. Kerjasama pembangunan

Isu lain yang dibahas adalah mengenai perdagangan di bidang pertanian. Selandia Baru

menyampaikan *concern* mereka atas banyaknya persyaratan pemeriksaan ekspor hewan ke Indonesia. Selandia Baru juga mengangkat pembatasan ekspor daging ke Indonesia. Indonesia menanggapi dengan menegaskan bahwa pemerintah Indonesia perlu menjamin adanya keseimbangan antara suplai daging dari produsen di dalam negeri dan luar negeri. Kedua belah pihak akhirnya sepakat bahwa semua isu SPS akan dikonsolidasikan melalui forum bilateral di bidang pertanian dan Komite SPS pada AANZFTA.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan tentang kepentingan Selandia Baru melakukan kerjasama perdagangan bebas dengan Indonesia dalam kerangka AANZFTA tahun 2012-2015, yaitu :

1. Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional 2012-2014 dari pajak ekspor mengalami penurunan yang signifikan. Fungsi pajak dalam perdagangan internasional tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan (*fungsi budgetair*) saja, namun pajak lebih berperan sebagai alat pengatur (*regulerend*).
2. Indonesia adalah negara yang kaya raya. Potensi kekayaan alamnya sangat luar biasa, baik sumber daya alam hayati maupun non hayati. Bisa dibayangkan, kekayaan alamnya mulai dari kekayaan

laut, darat, bumi dan kekayaan lainnya yang terkandung di dalam bumi Indonesia tercinta ini mungkin tidak bisa dihitung. Apabila dilihat secara geografis, dari sabang sampai merauke, terbentang tidak sedikit pulau yang ada di Indonesia.

3. Diantara beberapa perjanjian perdangan regional yang telah diimplementasikan oleh Indonesia yang paling baru adalah perjanjian perdagangan barang dalam rangka ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA). Pengesahan AANZFTA sendiri oleh Pemerintah Indonesia diratifikasi dalam Peraturan Presiden No.26 Tahun 2011 sedangkan penetapan tarif bea masuk atas barang impor dalam rangka AANZFTA diatur dalam PMK No.166 Tahun 2011.
4. Selandia Baru merupakan produsen utama produk-produk yang terbuat dari susu (*dairy products*) dan daging, kayu dan produk kayu, ikan dan olahannya, mesin-mesin, serta produk pertanian seperti buah-buahan dan gandum.
5. Pengaruh Politik Selandia Baru Bagi Indonesia karena hubungan diplomatik Indonesia – Selandia Baru telah terjalin sejak 1958. Selaku dua negara demokrasi, Indonesia dan Selandia Baru memiliki dasar hubungan yang kokoh. Hubungan

bilateral kedua Negara diawali dengan kerjasama di bidang pendidikan pada akhir tahun 1950-an, yaitu dengan dilaksanakannya pendidikan bahasa Inggris bagi guru-guru bahasa Inggris di bawah kerangka Colombo Plan. Sejatinya AANZ-FTA tidak banyak manfaatnya bagi Indonesia.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka penulis member beberapa saran tentang kepentingan Selandia Baru melakukan kerjasama perdagangan bebas dengan Indonesia dalam kerangka AANZFTA tahun 2012-2015, yaitu :

1. Meskipun hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Selandia Baru kini memiliki ikatan persahabatan dan kerjasama yang sehat dan penuh kepercayaan di semua tingkatan, dari tingkat pemerintah sampai ke hubungan diantara warga negaranya. Namun demikian, tantangan ke depan dalam hubungan bilateral kedua Negara ini tidaklah kecil. Memimpinnya perdana menteri John Key menciptakan harapan baru bagi perkembangan kerjasama antara Indonesia dan Selandia Baru. Bagi hubungan kedua Negara, peluang dan kendala memang datang sama besarnya. Oleh karena itu sepantasnya hubungan yang tercipta adalah hubungan yang semakin erat dan kukuh.

2. Untuk mencapai keuntungan bersama Indonesia dan Selandia Baru berusaha saling melengkapi, Indonesia dengan kuantitas sumber daya alam yang besar dan tersedianya tenaga kerja yang memadai digabungkan dengan modal besar yang dimiliki oleh Selandia Baru sangat berguna dan bermanfaat untuk memajukan kedua negara.
3. Diharapkan kedua pemimpin dari masing-masing Negara mampu mengelola berbagai peluang dan tantangan yang ada untuk semaksimal mungkin meningkatkan hubungan bilateral yang berlandaskan rasa saling menghargai, saling menguntungkan, serta tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Tanpa kerjasama yang erat di antara kedua Negara dapat dipastikan tidak akan tercipta kestabilan dan kemakmuran di kawasan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

- Acharya. Amitav. & Johnston, Alastair Iain. (ed.) *Crafting Cooperation Regional International Institution in Comparative Perspective*. New York: Cambridge University Press.
- John T. Raoukre. 2001. *International Politics on The World Stage*. USA.

Saptana, Friyatno S, Bastuti TP. 2008. *Analisis Daya Saing Komoditi Tembakau Rakyat Di Klaten Jawa Tengah*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.

Tseuo, 2012. *The Impact Of The Australia And New Zealand Free Trade Agreement On The Beef Industry In Indonesia*. *J. ISSAAS Vol. 18, No. 2:70-82 (2012)*,

Wahyuni, Sri. 2013. *Jurnal : Hubungan Kerjasama Indonesia – Selandia Baru Di Bidang Ekonomi Dalam Kerangka ASEAN – AUSTRALIA – NEW ZEALAND FREE TRADE AREA (AANZFTA)*. Kalimantan : Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Buku-buku :

- Arifin, Sjamsul, dkk. 2007. *Kerjasama Perdagangan Internasional: Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia*. Jakarta : Penerbit Gramedia.
- Basri Faisal dan Haris Munandar. 2010. *Lanskap Ekonomi Indonesia*. Jakarta : Penerbit Prenada Media Group.
- Dougherty, James E. & Robert L. Pfaltzgraff. 1997. *Contending Theories*. New York: Harper and Row Publisher.